



Verifikasi SKTM Hanya Jika Terindikasi Palsu

YOGYA, TRIBUN - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan tidak semua Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diverifikasi. Verifikasi hanya dilakukan pada SKTM yang terindikasi palsu.

"Tidak semua SKTM diverifikasi, yang terindikasi palsu saja. Kan sudah ada koordinasi dengan Dinas Sosial. Jika tidak sesuai, maka akan dilakukan verifikasi, akan datang ke rumah-rumah," kata Baskara Minggu (15/7).

Ia menyerahkan verifikasi kepada sekolah. Menurutnya surat pernyataan yang sudah dibuat oleh orangtua calon siswa mampu menepis kemungkinan SKTM palsu.

"Kan sudah ada surat pernyataan kemarin. Pernyataannya mengatakan kalau diperoleh dengan cara yang benar. Sekolah juga boleh kalau mau verifikasi," lanjutnya.

Pihaknya akan bertindak tegas jika memang terbukti ada calon siswa yang mendaftar menggunakan SKTM palsu. Sesuai dengan ketentuan, ia akan mengeluarkan siswa tersebut.

"Dalam surat pernyataan tersebut kan juga ada konsekuensinya, yaitu dikeluarkan. Ya, kami akan bertindak tegas. Walaupun sudah diterima, tetap akan kami keluarkan," tegas Baskara.

"Terkait dengan SKTM batasannya tidak hanya sampai daftar ulang saja. Setelah itu, jika memang ketahuan, ya kami tetap akan keluarkan," sambungnya.

Ia meminta masyarakat untuk melapor, jika memang mengetahui informasi SKTM palsu. Menurut pengawas masyarakat juga penting.

● ke halaman 19

Verifikasi SKTM Hanya Jika

● Sumbangan Hal 13

"Saya kira pengawasan dari masyarakat penting juga. Jika memang ada yang tahu, misal tetangganya menggunakan SKTM palsu, ya langsung saja lapor. Kami akan bertindak tegas," ujarnya.

Pungutan dilarang

Terkait dengan pungutan sekolah, Baskara menegaskan sekolah tidak boleh melakukan pungutan.

"Sekolah tidak boleh ada pungutan. Kalau sumbangan boleh. Sumbangan itu sifatnya tidak mengikat. Tidak semua nilainya harus sama, tidak diatur detail, itu namanya sumbangan," tegasnya.

"Sekolah wajib mema-

sukkan pendapatan dari sumbangan itu untuk apa, bersama dengan komite. Karena sumbangan itu tidak boleh dilakukan oleh sekolah, tetapi komite," lanjutnya.

Ia pun mengungkapkan sudah ada petunjuk teknis terkait pemasukan sekolah. Oleh sebab itu, ia meminta sekolah untuk mematuhi petunjuk yang sudah ada.

PLS tanpa perpeloncoan

Hari pertama masuk sekolah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, DIY, Kadarmanta Baskara Aji menegaskan tidak boleh ada perpeloncoan.

"Hari pertama sekolah tidak boleh ada perpeloncoan. Yang namanya Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) itu sekolah menginformasikan program-program sekolah. Jadi tidak ada itu perpeloncoan, tidak boleh," tutur Baskara Minggu (15/7).

Terkait hari pertama sekolah, pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke sekolah-sekolah. Dalam surat tersebut disampaikan terkait kegiatan PLS.

"Sudah ada surat edaran. Dalam edaran itu, tiga hari pertama sekolah dilakukan PLS. Dalam surat edaran itu detail kami tuliskan, apa-apa saja yang boleh dilakukan selama PLS. Jadi PLS memang diisi untuk mengenalkan lingkungan sekolah," lanjutnya.

Baskara juga mengatakan dalam surat edaran tersebut meminta kepala sekolah untuk mendampingi selama proses Pengenalan Lingkungan Sekolah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan. (cr2)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	
1. Din. Pendidikan	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005